

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshidiqie, J. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT RajaGrafindo Persada.
- Asyhadie, Z., Rahman, A., & Mualifah. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Chaidir, E. (2007). *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*. Kreasi Total Media.
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern*. Reflika Aditama.
- HR, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Huda, N. (2010). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*. Penerbit Nusa Media.
- H., & Syah Rezah, Farah, S.H., M. H. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Khusus*. CV. Social Politics Genius (SIGn).
- Jalil, H., ode Husen, L., Abidin, A., & syah Rezah, F. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus* (p. 206). CV. Social Politics Genius (SIGn).
- Jimly Asshidiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.
- Kansil, C., Christine, Kansil, S. ., Palandeng, & Mamahit N, G. (2009). *kamus istilah hukum*
- Kencana Syafie, I. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama.
- Labobo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*.
- Mahfud MD, M. (2012). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Moh Mahfud, M. (n.d.). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan*. Reneka Cipta.
- Ramli, S. (2020). *Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat*.
- Ridwan, H. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Sadi Is, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. KENCANA.

- Setijo, P. (2010). *Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*.
- Soekanto, Soerjono. (1999). *pokok-pokok sosiologi hukum*. Raja Grafindo Persada.
- , (2006). *Penelitian Hukum Normatif “satu Tujuan Singkat.”* Rajawali Pers.
- , (2006). *Penelitian Hukum Normatif “satu Tujuan Singkat.”* Rajawali Pers.
- Syahrani, R. (2011). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkas.
- Yusnani, D. (2017). *Hukum Pemerintah Daerah*.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disesase 2019 (COVID-19)
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Virus Corona Disesase (COVID-19)
- Intruksi Presiden nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

### C. Sumber Lain

- Afandy, D. (2008). Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM. *Jurnal Ilmu Kedokteran*.
- Aldimassarif. (2020). *No Title*.
- Arina, emilia dkk. (2020). Strategi dan tantangan dalam meningkatkan cakupan vaksinasi covid-19 untuk herd immunity. *Jurnal Medika Hutama*, 02(01), 402–406. <http://www.jurnalmedikahutama.com/index.php/JMH/article/view/264/179>
- Asyhadie, Z., Rahman, A., & Mualifah. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Chaidir, E. (2007). *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*. Kreasi Total Media.
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 323–338. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/709>
- Fitriyana, Hamdi, A. N., & Akhmad, B. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Mengenai Pemberian Vaksin Terhadap Pengurangan Laju Pertumbuhan Kasus Covid-19 di Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin. *Universitas Islam Kalimantan*, 1–12.
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern*. Reflika Aditama.
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Aspek Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia. *Prosiding SENAPENMAS*, 10(April), 1263. <https://doi.org/10.24912/psenapenmas.v0i0.15162>
- Hertianto, & Maharani. (2021). Analisis Yuridis Vaksin Covid-19 Ilegal: Perlindungan dan Penegakan Hak Kesehatan Warga Negara Indonesia. *Proceeding Unnes.Ac.Id*, 7(1), 301–322. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/708>
- Huda, N. (2010). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH*. Penerbit Nusa Media.
- Ibid. (n.d.). *No Title*.
- Islamy, Y. (2021). Urgensi Pengaturan Trading in Influence Sebagai Sarana Pembangunan Masyarakat. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1). <https://doi.org/10.30996/dih.v17i1.4132>
- Isriawaty, fheriyal. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(2), 1–10.
- Jalil, H., ode Husen, L., Abidin, A., & syah Rezah, F. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*. CV. Social Politics Genius (SIGn).
- Jimly Asshidiqie. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*.
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(6), 509–518. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>
- Katharina, R. (2020). Relasi Pemerintah Pusat- Pemerintah Daerah Dalam Penanganan COVID-19. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, xii(5), 25–30.

- [http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info\\_singkat/Info Singkat-XII-5-II-P3DI-Maret-2020-221.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-5-II-P3DI-Maret-2020-221.pdf)
- Kencana Syafie, I. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama.
- Kurniadi, Y U., et al. (2020). Komunikasi Kesehatan di Era Digital. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Labobo, M. (2006). *Memahami Ilmu Pemerintahan*.
- Lestari, F. D., Rismayanti, Z., Wicaksono, B., & Fauzi, M. (2021). Usulan Penentuan Titik Lokasi Pusat Distribusi Vaksin Covid-19 Di Jawa Barat. *Jurnal Bayesian : Jurnal Ilmiah Statistika Dan Ekonometrika*, 1(2), 143–155.  
<http://bayesian.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/17>
- Mahfud MD, M. (2012). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mandong, O. T. P. (2019). *Sistem Penyimpanan Dan Distribusi Vaksin Di Puskesmas Tarus Tahun 2019*. 1–59.
- Mario Mean, V., Sambali, S., & Rumimpunu, D. (2022). *INJAUAN YURIDIS MEKANISME PELAKSANAAN DAN KUALITAS PELAYANAN VAKSINASI TERHADAP MASYARAKAT DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 10 TAHUN 2021*. X(1), 178–187.
- Moh Mahfud, M. (n.d.). *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan*. Reneka Cipta.
- Mufidah, L., & Tejomurti, K. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 7(3), 6.
- Nadiyah, C. (2021). *Meninjau Vaksinasi Covid-19 Kebijakan Kesehatan Dalam Perspektif Publik DiKabupaten Kartanegara*.
- Nurlaiah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal Dinamika*, 1(2), 59–68.  
<https://journal.unbara.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1135>
- Pratama, A. (2021). Pemenuhan Vaksinasi Covid-19 Sebagai Hak Atas Kesehatan Bagi Masyarakat Adat di Indonesia. *Proceeding Unnes.Ac.Id*, 7(1), 219–236.  
<https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snh/article/view/705>
- Rahman, Y. A. (2021a). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2), 80–86. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>
- Rahman, Y. A. (2021b). Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). *Khazanah Hukum*, 3(2), 80–86. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>
- Ramdani, D. (2021). *Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia*. 10(2), 2021.  
<https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2361>
- Ramli, S. (2020). *Bacaan Wajib Pengadaan Barang/Jasa Penanganan Keadaan Darurat*.
- Ridwan, H. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Sadi Is, M. (2015). *Pengantar Ilmu Hukum*. KENCANA.
- Sajidah, R. M. (2021). *Analisis Distribusi Vaksin Covid-19 Dengan Metode Cold Chain Dalam Memelihara Kualitas Vaksin (Studi Kasus pada Puskesmas di Wilayah Kota Depok)*.
- Setijo, P. (2010). *Pancasila Persfektif Perjuangan Bangsa*.

- Siallagan, A. (2021). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Siregar, R., & Prabawati, I. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 471–486.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif “satu Tujuan Singkat.”* Rajawali Pers.
- Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>
- Suri, I., Hidayat, N., & Halim, U. (2021). Komunikasi Kesehatan di Era Digital: Strategi Pemerintah dalam Sosialisasi Program Vaksin COVID-19. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(4), 850–858. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/4627>
- Surianta, A. (2021). *Bekerja Sama Melawan Pandemi*. 41.
- Sutari, Idris, H., & Misnaniarti. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Indonesia: narrative review. 11(1). <https://doi.org/10.30644/rik.v11i1.637>
- Syahrani, R. (2011). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Thorik, S. H. (2020). Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 115–120.
- Triasti, D. (2021). PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(6).